

Sinergitas Pemikiran Muhammad Natsir Di Bidang Teologi, Pendidikan dan Politik (Suatu Kajian Perspektif Pemikiran Politik Islam)

M. Basir Syam

Guru Besar Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Abstrak

Karya ilmiah ini merupakan suatu studi Pemikiran Politik Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan konten analisis melalui beberapa karya tokoh yang bersangkutan. Yang menjadi obyeknya adalah pemikiran Muhammad Natsir, seorang tokoh nasional yang pernah menjabat Perdana Menteri Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengungkapkan corak pemikiran Beliau sebagai seorang politisi yang memiliki reputasi internasional. Hasil penelaahan penulis menemukan bahwa Muhammad Natsir adalah seorang pemikir muslim yang telah menulis buku dalam beberapa bidang, Tulisannya paling menonjol terutama di bidang agama, pendidikan dan politik. Ketiga bidang ini menyatu dalam sistem pemikirannya. Penulis menemukan sinergitas pemikiran beliau pada ketiga bidang tersebut. Agama adalah soal hidup dan mati (ultimate), pendidikan adalah jalan yang paling efektif untuk menginternalisasikan ajaran agama Islam, sedangkan politik adalah power yang dapat dimanfaatkan untuk mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial.

Kata kunci: Muhammad Natsir, sinergitas, pemikiran tentang agama, pendidikan dan politik.

Pendahuluan

Kebangkitan Islam sejak abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan di beberapa negara Islam seperti di Turki, Mesir dan India. Daerah-

daerah tersebut merupakan basis kerajaan Islam yang pernah mengalami kejayaan di masa lampau, kemudian bangkit kembali setelah menyadari keterbelakangannya dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai negara-negara Barat.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sebelumnya disepanjang wilayah tersebut juga pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, juga menyadari perlunya gerakan pembaharuan tersebut, meskipun upaya dalam hal itu baru dimulai pada akhir abad ke-19 di Minangkabau, namun sejak awal abad ke-20 gerakan ke arah pembaharuan terus berkembang dengan pesat, terutama di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Sejak itu umat Islam diperhadapkan kepada masalah-masalah kontemporer, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Dalam perkembangan tersebut di atas telah melahirkan beberapa tokoh pembaharu yang berbeda-beda karakteristik dan corak yang ditampilkannya sesuai dengan kecenderungan dan sudut pandang masing-masing. Salah seorang di antaranya Muhammad Natsir. Dipilih tokoh tersebut sebagai objek kajian ini, karena penulis tertarik bahwa beliau, selain sebagai pemikir yang hidup dalam tiga zaman di Indonesia yakni era Kolonial, era Orde Lama dan era Orde Baru, juga sekaligus sebagai praktisi pada bidang yang dikajinya.

Titik berat yang menjadi fokus kajian makalah ini mengangkat tiga bidang yang terutama dibahas oleh beliau, yakni: bidang keagamaan dengan teologi, bidang pendidikan dan bidang politik. Penulis berasumsi bahwa ketiga bidang itu dalam pemikiran tokoh itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika yang disebut pertama berfungsi sebagai pondasinya, maka kedua bidang lainnya sebagai pilar yang tegak berdiri di atasnya.

Dalam mengkaji masalah tersebut di atas, penulis menggunakan pendekatan sosio-historis, dalam artian bahwa selain diungkapkan secara historis, juga diusahakan analisa yang bersifat sosiologis, sehingga pikiran-pikiran Natsir tidak hanya dilihat secara kronologis, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor kondisi pada zaman.

Sekilas tentang Biografinya

Muhammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatra Barat, pada tanggal 17 Juli 1908, adalah seorang anak pegawai pemerintah. Pada tahun 1927 ia berangkat ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya pada Al-Agemene Middelbare School. Sebelumnya ia telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah pertamanya pada sekolah HIS dan MULO di daerah Minangkabau. Di daerah ini juga ia pernah belajar pada sekolah agama yang dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Tuan Mondo Amin, seorang kawan dari Haji Rasul. Selain itu ia juga mengikuti pelajaran secara teratur yang diberikan oleh Haji Abdullah Ahmad. Dengan itu dapat dikatakan bahwa Muhammad Natsir telah mengenal paham pembaharuan semenjak ia masih remaja (Deliar Noer, 1990:100).

Di samping memasuki sekolah pendidikan barat, di Bandung minat Muhammad Natsir semakin dekat dengan agama. Pada tahun 1928 ia menjadi anggota Jong Islamieten Bond cabang Bandung di mana ia juga memberikan pelajaran kepada sesama anggota. Kemudian ia juga mengajar agama di Holland Illandse Kweekschool (HIK, Sekolah guru) dan MULO. Muhammad Natsir juga aktif mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh organisasi PERSIS, terutama dalam pelaksanaan acara Jum'at, sehingga ia mempunyai hubungan rapat dengan tokoh-tokoh Persatuan Islam ini. Terutama Hassan, banyak memberikan bimbingan kepada Natsir (Deliar Noer, ibid).

Muhammad Natsir sejak awal sudah nampak bakatnya dalam menulis. Majalah Persis 'Pembela Islam', dijadikannya sebagai media dalam mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Karena perhatian Natsir yang begitu besar dalam studi keislaman, sehingga ia menolak tawaran

beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melanjutkan studinya ke sekolah tinggi hukum di Jakarta atau sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam, negeri Belanda. Ia malah memikirkan dan aktif menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak muslim (Deliar Noer, *ibid*).

Untuk keperluan terakhir ini Muhammad Natsir Memulainya dengan tekad yang besar, walau modal yang sangat minim. Ia menyewa sebuah tempat yang amat sederhana dengan kapasitas daya tampung yang sangat terbatas di jalan Pangeran Sumedang di Bandung. Dengan bantuan seorang dermawan, Haji Muhammad Junus, sekolah yang didirikan Natsir dapat berkembang dan mendapat respons dari masyarakat Islam. Dalam memberikan pelajaran Muhammad Natsir dibantu oleh kawan-kawannya pada waktu itu antara lain Nur Nahar, yang kemudian menjadi istri Muhammad Natsir (Yusuf, 1978:29).

Ketika itu disadari oleh Natsir, ada tiga syarat yang dapat menunjang tegaknya suatu lembaga pendidikan, yakni: Modal untuk menyewa atau mendirikan gedung dan segala peralatannya, bantuan tenaga pengajar dari kawan-kawannya yang secita-cita dan seperjuangan serta ilmu pendidikan yang dapat mengarahkan jalannya usaha pendidikan tersebut. Untuk keperluan yang terakhir itu, ia memasuki pendidikan guru yang diselenggarakan oleh AMS selama satu tahun. Tahun 1932, ia berhasil menyelesaikan program diploma tersebut. Selama Natsir dalam pendidikan tersebut, ia dapat menyusun rumusan atau rencana pendidikannya yang terdiri dari sekolah dasar, menengah dan sekolah guru. Teman-temannya di AMS seperti Ir. Ibrahim, Ir. Indracaya, Fachruddin Al-Khahiri dan sebagainya disamping Nur Nahar, banyak membantu dalam perkembangan sekolahnya. (Yusuf, *ibid*). Demikianlah lembaga pendidikan yang dirintis oleh Natsir mengalami perkembangannya dan pada akhirnya mengalami nasib buruk dengan datangnya masa penjajahan Jepang yang menutup semua sekolah partikelir, termasuk sekolah-sekolah Natsir. Namun semangat pendidikan Natsir ini tidak pernah pudar, Beliau terus memikirkan pendidikan Islam walaupun pada akhir hayatnya tidak sempat lagi menekuni bidang pengajaran di lembaga pendidikan formal.

Selain di bidang pendidikan, Muhammad Natsir banyak berkiprah di bidang politik. Bagi Natsir, di zaman kolonial, terjun di bidang politik merupakan suatu hal yang sangat lumrah. Seseorang yang telah terjun di masyarakat, jika ia sadar melihat ketimpangan yang ada dengan sendirinya iapun berusaha merubah hal tersebut. Upaya merubah keadaan yang ada sebenarnya seseorang dengan sendirinya sudah terjun ke dunia politik. Apakah yang bersangkutan berprofesi sebagai seorang guru, dokter, insinyur, ulama atau apa saja.

Sebagai anggota Jong Islamieten Bond maupun Persis, Muhammad Natsir giat dalam lapangan politik menghadapi pemerintah kolonial. Ia juga banyak melakukan polemik dengan kalangan politisi kebangsaan yang netral agama, terutama dengan Sukarno. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Natsir sebagai seorang yang kukuh dalam pendirian Islam. Hal tersebut terjadi baik pada masa kolonial maupun setelah kemerdekaan. Kegiatan politik Muhammad Natsir pada garis besarnya dapat dilihat pada jabatan yang pernah dipegangnya antara lain: Ketua Jong Islamieten Bond Bandung (1928-1932), Anggota Dewan kabupaten Bandung (1940-1958), Anggota Badan Pekerja KNIP (1945-1946), Menteri Penerangan RI (1950-1951), Ketua Umum Partai Masyumi (1949-1958), Perdana Menteri RI (1950-1951), Anggota Parlemen RI (1950-1958), Anggota Konstituante (1956-1958), Anggota PRRJ (1958-1960), Vice President World Muslim Congress (1967) dan sebagainya (Natsir, 1980:52).

Kegiatan dan pemikiran Natsir dalam bidang tersebut di atas adalah merupakan refleksi dari pandangan teologisnya. Yakni keyakinan akan kebenaran Islam sebagai pandangan hidupnya sekalipun Natsir mentolerir kemerdekaan berpikir (akal), namun baginya akal memerlukan bimbingan untuk dapat berfungsi dan menghasilkan kebenaran yang hakiki. Karena itu tauhid

merupakan fundamen dari segala pemikiran dan aktifitasnya. Dan itulah yang ingin ditegakkannya dalam seluruh perjuangannya. Ia dapat menerima apa yang datang dari Barat, khususnya dalam bidang kehidupan duniawi sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena menurutnya Islam bukanlah agama Timur ataupun Barat, melainkan agama Allah yang memiliki Timur dan Barat. Karena itu Islam menjadi patokan dalam kehidupan dan seorang muslim dapat mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang datang dari manapun dan dari siapapun datangnya. Namun dalam hal Aqidah dan ibadah prinsipnya, “semuanya tidak boleh kecuali apa yang telah digariskan”.

Dalam bidang keagamaan ini Natsir mengakui, selain belajar sendiri, juga banyak mempelajari dari ulama dan intelektual yang lebih senior. Di masa mudanya, jika menghadapi problema keagamaan ia dan kawan-kawannya mendatangi para ulama untuk meminta pandangannya. Sebagai pendukung pembaharuan, pada waktu itu ia dekat dengan A. Hassan dan Haji Agus Salim. Intelektual muslim terakhir ini memberikan kesan tersendiri dalam pemikiran Natsir. Satukesannya tentang Haji Agus Salim bahwa beliau jika ditanyakan suatu masalah kepadanya, tidak langsung mengambil keputusan tentang masalah tersebut, melainkan cukup dengan memberikan pengarahannya tentang cara pemecahan masalah tersebut, kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan untuk mengambil keputusan tentang permasalahan yang dihadapinya. Hal ini diakui Natsir sebagai motivasi yang sangat kuat untuk mewujudkan kemandiriannya dalam berfikir.

Demikian sekilas gambaran umum tentang Muhammad Natsir dan pokok-pokok yang menjadi objek pemikirannya. Dipilihnya ketiga bidang kajian tersebut di atas, tidak berarti bahwa Natsir hanya menulis dan berbicara tentang ketiga masalah tersebut, akan tetapi jika ditelusuri pemikiran dan aktifitasnya dapat disimpulkan penekanannya pada ketiga hal tersebut. Tulisan-tulisannya tentang kebudayaan Islam maupun seluruh aktifitasnya di bidang da'wah dapat dikategorikan ke dalam bidang pendidikan, demikian juga seluruh aktifitas kepemimpinannya dan pemikirannya dalam menata masyarakat baik yang berskala regional, nasional maupun internasional adalah menyangkut bidang politik. Sedangkan pemikiran teologis yang dimaksud adalah meliputi pandangan keagamaannya yang menjadi fundamen bagi seluruh aspek pemikirannya.

Bidang Teologi

Pada bagian ini penulis tidak bermaksud menguraikan pandangan Natsir secara rinci tentang tema-tema kajian teologi, melainkan hanya mengangkat sekelumit mengenai sistem teologi yang dianutnya yang pada dasarnya dapat dilihat pada pandangannya tentang hubungan antara wahyu dan akal pikiran serta sikap beliau dalam menghadapi persoalan kehendak mutlak Tuhan dan kebebasan manusia. Dalam karyanya, Islam dan Akal Merdeka. Muhammad Natsir mengawali dengan mengangkat beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan betapa Islam menghargai peranan akal pikiran manusia. Natsir mengutip surah Al-Waqi'ah ayat 58-72, yang antara lain menunjukkan perintah Allah memperhatikan dan memikirkan tumbuh-tumbuhan yang hidup, api yang menyala, air hujan yang turun dari langit, demikian pula keterangan dari ayat-ayat lain yang menyuruh memikirkan tentang hewan-hewan, bumi yang terhampar, langit yang ditinggikan, gunung yang tegak, awan dan mendung yang bergerak beriringan, dan disuruh mengambil konklusi tentang kebesaran dan kekuasaan Tuhan.

Menurut Natsir bahwa Islam sangat mencela orang-orang yang tak menggunakan akalinya, orang yang terikat pikirannya dengan kepercayaan-kepercayaan dan paham-paham manusia yang tidak berdasar kebenaran, mereka yang tidak mau memeriksa, apakah kepercayaan dan paham-paham yang disuruh orang terima itu berdasar kebenaran atau tidak. Tegasnya bahwa Islam melarang bertaklid pada paham dan i'tiqad yang tidak berdasar wahyu Ilahi yang nyata, hanya

sekedar menurut paham-paham lama (pikiran tradisional) yang turun temurun dengan tidak mengetahui dan memeriksanya terlebih dahulu, apakah paham itu berguna dan berfaedah atau tidak (Natsir, 1988:5)

Akan tetapi Natsir menyadari keterbatasan akal pikiran manusia. Karena itu akal memerlukan bimbingan dan petunjuk dari wahyu Ilahi, jika tidak maka akal yang lepas kontrol dapat mengambang, bahkan bisa sesat. Ia menggambarkan bahwa akal yang sedemikian dapat saja melogiskan dan merasionalkan semua khurafat, semua bid'ah dan takhyul. Ia melihat fakta yang kontroversial mengenai hasil kerja akal yang bebas. Dengan akal merdeka mungkin seseorang mencela pemujaan patung, penggunaan azimat karena dianggapnya tidak logis, akan tetapi dengan akal itu pula yang mencarikan alasan mengkultuskan seseorang, menghormati bendera, terpaku dihadapan api unggun, mengadakan patung R.A. Kartini meletakkan patung itu ditempat yang terang laras, mengatur upacara berdiri sambil berta'jub tafakkur dihadapan benda yang tak bernyawa itu.

Natsir mengemukakan beberapa contoh tentang akal yang terbimbing dengan wahyu Ilahi. Dengan akal merdeka, kaum muslimin terbebas dari kekolotan yang membekukan otak, kejumudan, dengan akal merdeka telah melahirkan seorang Washil Ibn Atha' yang berani mengkritik cara berfikir Imam Hasan Al-Bashri. Dengan akal itu pula telah melahirkan Abu Al-Huzail Al-Allaf, Al-Nazzam dan lain-lain pujangga Mu'tazilah yang tak kalah ketajaman otaknya dibandingkan dengan filosof-filosof Barat. Dengan akal pula melahirkan Fakhruddin Al-Razi yang melahirkan tafsir Qur'an yang hingga kini tetap up to date, melahirkan Asy'ari yang berani mengkritik kelemahan-kelemahantokoh-tokoh Mu'tazilah dan melahirkan aliran teologi yang diperpegangi sebagian besar ummat Islam hingga dewasa ini. Asy'ari dengan teori 'Ainusysyai'-nya tak kalah jika dibandingkan dengan teori Das Ding an Sich-nya Immanuel Kant, atau dengan teori "Kasb"-nya yang mendahului teori "Harmonia Praestabilia"-nya Leibnitz. Akal merdeka yang terbimbing pula melahirkan A-Ghazali, Ibn Taimia, seorang Muhammad Abduh dan sebagainya (ibid:8-9). Muhammad Natsir mengakui betapa besar peran Mu'tazilah dalam membela kebenaran Islam dengan argumen rasionalistiknya. Akan tetapi seorang Mu'tazilah seperti Al-Jubba'i akhirnya harus mengakui kritikan Asy'ari bahwa banyak hal di mana kita terpaksa harus mengatakan "Huwallah A'lam!", atau menerima informasi wahyu dengan prinsip "Bila-kaifa". Ia menjelaskan bahwa lapangan akal dapat menjelajahi semua ciptaan Ilahi, akan tetapi dilarang mengorek persoalan tentang (Zat) Allah. Demikian pula jika orang memperdebatkan tentang qadha dan qadar maka sebaiknya kita diam saja, karena persoalan itu diatas jangkauan akal (ibid:18-20).

Lebih jauh Muhammad Natsir mengemukakan variasi masalah agama yang harus diterima apa adanya dan yang harus dipikirkan. Baginya ada perintah-perintah agama yang maknanya tidak terjangkau oleh akal seperti shalat, puasa, haji dan sebagainya. Hal seperti ini harus diterima apa adanya menurut petunjuk yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu ada juga perintah agama yang ma'qul dan cukup pula keterangan-keterangan agama yang menunjukkan illat-nya seperti menutup aurat, berbakti kepada ibu-bapak. Hal seperti ini dan sebagainya, cara dan alat-alat melakukannya diserahkan kepada pemikiran ummat Islam untuk memecahkannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Selain kedua macam tersebut, terbentang luas persoalan kehidupan dunia yang diserahkan kepada pemikiran manusia untuk memecahkan dan mengambil manfaatnya sesuai dengan keperluan dan tuntutan zaman, akan tetapi diingatkan jangan sampai melanggar nilai-nilai dan prinsip Islam yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Persoalan dunia seperti sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya berlaku prinsip "semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang" (ibid:25-27).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam pandangan Natsir, wahyu merupakan landasan

tempat berpijak dalam kehidupan keagamaan yang sekaligus berfungsi sebagai rujukan yang mesti ditaati dalam soal aqidah dan ibadah. Sedangkan akal merupakan alat yang efektif dalam memahami ajaran agama tersebut. Dalam soal aqidah dan ibadah akal hanya berperan menjelaskan, tidak mesti menghakimi wahyu dengan aturan logika yang ada padanya. Tetapi dalam soal muamalat, akal sebaliknya harus bekerja keras bahkan dituntut oleh wahyu itu sendiri untuk memecahkan berbagai problema kehidupan yang bersifat kontemporer yang tentunya sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh wahyu.

Bidang Pendidikan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Muhammad Natsir memperoleh pendidikan formalnya melalui pendidikan Barat. Ia termasuk orang yang beruntung diantara banyak orang pribumi yang tidak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan modern yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun demikian dengan latar belakang keluarganya dari masyarakat Minangkabau yang taat beragama membekas pula dalam kepribadiannya.

Pendidikan bagi Natsir adalah menyangkut kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dia melihat adanya ketimpangan antara pendidikan Barat dengan pendidikan yang selama ini dikelola oleh ummat Islam. Diukur dari segi kemajuan duniawi, pendidikan Barat lebih maju, akan tetapi dari segi nilai etis dan kepentingan ukhrawi pendidikan yang dikelola ummat Islam lebih menonjol. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi pemikiran Natsir sehingga iaterjun ke dunia pendidikan. Ia berusaha menyatukan kedua keutamaan yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut, sehingga dalam hal ini sangat terbuka menerima hal-hal yang bersifat positif yang ada dalam pendidikan Barat. Dalam hal ini terutama yang menyangkut perkembangan sains dan teknologi. Bagi Natsir tidak melihat dari segi Barat dan Timurnya, melainkan kemajuan itu sendiri yang diakuinya ada pada pihak Barat.

Natsir juga menunjukkan kekurangan pendidikan Barat dari segi ruhaniah. Dalam hal ini pendidikan Islam dengan landasan tauhidnya merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya. Suatu contoh fenomena pendidikan Barat dikemukakan Natsir tentang problema yang dihadapi Prof. Paul Ehrenfest, guru besar dalam ilmu fisika. Paul Ehrenfest meskipun seorang terpelajar yang berasal dari keluarga yang berperangai baik-baik dan dia sendiri dikenal sebagai ilmuwan yang bermoral. Tetapi pada akhir hayatnya ia lalu membunuh anak sendiri lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut surat pernyataan yang ditinggalkan bahwa hal itu dilakukan secara sadar karena ada suatu hal yang mengganjal dalam pikirannya yaitu kesadaran akan perlunya kepercayaan tempat bergantung selama ini telah disepelkannya karena percaya akan kebenaran ilmu pengetahuan sebagai tumpuan segalanya, yang kemudian disadarinya pula sebagai suatu hal yang nisbi, yakni kebenarannya hari ini belum tentu kebenarannya hari esok, karena ilmu mengalami perubahan terus menerus. Professor tersebut mempunyai anak yang sangat dicintainya yang diharapkan sebagai generasi satu-satunya yang akan melanjutkan riwayat dan mewarisi intelektualnya, namun anak tersebut mengalami kelemahan otak sehingga pengorbanannya yang besar membiayai anaknya dianggapnya sia-sisa belaka. Karena tidak mempunyai pegangan hidup dalam mengatasi problema itu, lalu secara sadar ia tega membunuh anaknya dan dirinya sendiri. (Natsir, 1954:114).

Hal tersebut diatas menunjukkan suatu kelemahan Barat, dan harus disadari bahwa tidak semua yang datang dari Baratpun adalah otomatis bernilai baik. Karena itu Natsir tidak mentolerir westernisasi, pembaratan dan hanya menerima modernisasi dalam bidang muamalah dalam arti yang positif menurut spirit Islam. Suatu hal yang disoroti Natsir pada masalah pendidikan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda adalah usaha mereka mengajak golongan elit Indonesia

agar merasa diri sebagai orang Belanda yang sama-sama berkiblat ke Den Haag yang diistilahkan Natsir dengan “asimilasi” atau de-Indonesianisasi sehingga orang Indonesia bisa terlepas dari pandangan hidup dan budaya asli yang bersifat positif. Anak-anak yang berotak berilient ditiptkan kepada Kristen Belanda dan salah satu korbannya adalah Amir Syarifuddin yang lahir sebagai anakorang Islam kemudian menjadi orang Kristen Protestan.

Oleh karena itu dalam rangka kemajuan pendidikandikalangan muslim pada masa kolonial itu harus ditangani oleh orang Islam sendiri yang memiliki kesadaran mengenaipentingnya kemajuan duniawi dan ukhrawi, atau mereka yang mengikuti pendidikan Barat itu harus memiliki kesiapan imanyang tangguh, kesadaran akan makna baik dan buruk menurutukuran Islam. Sehingga dapat menangkal polusi yang timbul dari kebebasan berpikir yang tidak terkendali oleh nilai-nilai kebenaran wahyu Ilahi. Natsir menyambut baik suatu usaha pendirian perguruan tinggi pada zaman kolonial yang dipelopori oleh Dr. Satiman dari Muhammadiyah. Tetapi jugamengeritik dari segi penerapan idenya bahwa mahasiswa yang akan diterima hanya lulusan H.B.S. atau AMS dan menutuppintu bagi lulusan sekolah menengah Islam. Bagi Natsir pada masa itu justru lulusan sekolah menengah Islam sangat diperlukan untuk mengenyam pendidikan tinggi yang berorientasi kemajuan Barat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diterapkan pada perguruan tinggi itu. Sehingga memungkinkan lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang berkepribadian dan berkebudayaan Islam (Ibid, hal. 66).

Dalam rangka mengisi peluang tersebut di atas, Natsir mengajukan gagasan koordinasi perguruan-perguruan Islam (1938) yang akan menyatukan rencana pelajaran perguruan tersebut yang selama ini dinilainya belum adakeseragaman dan kesamaan sasaran yang kongkrit. Kalau persamaan dasar dan tujuandiakui memang selama ini sudah dimiliki, tetapi persamaan teknik pengajaran dan ragam ilmu pengetahuan belum nampak terutama yang berorientasi pada masalah kehidupan dunia, karena itu perlu diadakan. Koordinasi bagi Natsir bukan suatu normalisasi yang akan menghancurkan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing perguruan itu sesuai dengan cita-cita pendirinya, karena hal itu merupakan suatu hal yang layak sepanjang tidak mengabaikan kepentingan umum yang dibutuhkan ummat Islam pada waktu itu. Dalam mengatasi khilafiyah perlu ditekankan keterbukaan menerima dan memberi hal yang terbaik, dalam hal ini memerlukan pengorbanan integritas dalam rangka kepentingan integrasi sesama muslim (Ibid, hal. 81).

Di zaman kemajuan dewasa ini (pasca kemerdekaan) prinsip penyatuan agama dan ilmu pengetahuan tetap mutlak diadakan. Perkembangan di bidang industri kini ummat Islam harus terlibat, arus informasi dari Barat juga tidak dapat dielakkan. Karena itu yang penting peranan agama menjaga jangan sampai kemajuan industri dan informasi menimbulkan “permissiveness” yaitu melunakkan faktor manusiawi yang terlibat dalam perkembangan itu, agar modernisasi dalam bidang-bidang kehidupan tidak mengakibatkan tumbuhnya pandangan “semau gue” yang mencampakkan manusia pada kemerosotan akhlak. Natsir mengingatkan bahwa dinegeri Barat sendiri, dibalik kemajuan industrinya menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran dalam menghadapi polusi yang timbul. Pengotoran udara, air di daerah perindustrian, kemungkinan terjadinya perang nuklir yang berakibat degradasi total bagi penduduk bumi, angka pengangguran akibat mekanisasi industri yang berteknologi tinggi, yang kesemuanya itu merupakan masalah yang tidak mudah dipecahkan. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi dan industri adalah sesuatu yang netral, tergantung kepada manusianya dan masalahnya terletak pada motivasi dan cara penggunaannya, karena itu sebagai seorang muslim bagaimana kita memanfaatkan semua itu sebagai rahmat ilahi dengan motivasi untuk menegakkan kebajikan bagi ummat manusia (Natsir, 1987:2).

Prospektif ke arah kemajuan itu bagi Islam merupakan suatu keharusan selain ajaran Islam yang sangat menghargai akal pikiran manusia, memerintahkan menuntut ilmu tanpa membatasi

umur maupun tempat menimba ilmu, juga kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Islam dalam bidang tersebut pada masa pertengahan, di saat masyarakat Barat menyepelekan hal yang sama. Justru apa yang telah dicapai ummat Islam pada zaman lampau itu merupakan tindakan penyelamatan dan hasil pemikirannya merupakan mata rantai yang tak dapat dipisahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini.

Bidang Politik

Seperti halnya dengan keterlibatan Natsir di bidang pendidikan, di bidang politik ia tampil untuk memperbaiki keadaan masyarakat Islam dan dalam rangka memperjuangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ummat Islam perlu terlibat dalam menata kehidupan sosialnya sendiri. Bagi Natsir yang menganut prinsip keterkaitan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, tidak membiarkan adanya upaya menetralkan kedudukan ulama memimpin masyarakat.

Natsir menegaskan bahwa sejarah revolusi kemerdekaan kita membuktikan betapa besar kekuatan yang dapat terbangun bila sudah bertemu antara pesantren dengan universitas. Sama-sama berjumpa di mesjid jami setiap jum'at dimana terdengar seruan imam sebelum shalat "sawwu shufufakum" susunlah barisanmu! Seruan itu tidak hanya dipahami dalam mesjid saja, melainkan perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di luar mesjid (Ibid:8).

Di zaman kolonial, sebagai ketua Jong Islamiten Bond Natsir aktif memberikan kontribusi pemikirannya di bidang politik. Ia mengeritik beberapa artikel yang ditulis oleh orientalis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip politik Islam, seperti pandangan Dr. I. J. Brugmans yang mengajarkan bahwa Islam sesudah mengajarkan kalimat syahadat, terus memerintahkan untuk menaklukkan segala bangsa tanpa memperhatikan pendidikan bangsa yang ditaklukkannya. Brugmans dalam hal ini beralasan bahwa C. Snouck Hurgronje juga menyimpulkan demikian (Op. Cit: 119).

Natsir membantah pandangan itu dengan menunjukkan beberapa ayat suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang menegaskan bahwa Islam tidak serta merta menyerang suatu bangsa kecuali dengan alasan tertentu. Lagi pula bahwa Islam justru sangat mementingkan pendidikan ummat atau bangsa yang ditaklukkannya. Mengenai pernyataan bahwa Islam dikembangkan dengan perantaraan pedang yang dirujuk dengan pandangan Snouck, Natsir menulis bahwa jikaseandainya Snouck masih hidup dan membaca tulisan itu tentukan membantahnya, sebab Snouck sendiri mengakui hakekat ajaran Islam yang menekankan perlunya pendidikan itu, sekalipun Snouck memang mengakui bahwa dalam sejarah ummat Islam terkadang menukar penyiaran Islam melalui kalam dengan menggunakan pedang, yang jelas bukan Islamnya yang berhakekat demikian (Ibid:127).

Selain menghadapi pemerintah kolonial, Natsir juga banyak melakukan polemik dengan tokoh-tokoh nasionalis yang netral agama, seperti Sukarno. Berbeda dengan Sukarno, Natsir menyatakan bahwa kita harus menjelaskan konsep kebangsaan itu dengan agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia dan yang mendorong mereka dalam memperjuangkan nasib bangsanya. Menurut Natsir bahwa pergerakan Islamlah yang lebih dahulu membuka jalan politik kemerdekaan di tanah ini, yang mula-mula menanam bibit persatuan Indonesia yang menyingkirkan sifat kepulauan dan kepropinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama, senasib di luar batas Indonesia dengan tali keislaman (Natsir, 1931:14).

Tujuan kaum muslimin mencari kemerdekaan adalah untuk kemerdekaan Islam, supaya berlaku peraturan dan susunan Islam untuk keselamatan dan keutamaan ummat Islam khususnya dan segala makhluk Allah umumnya (Deliar Noer, Ibid:281). Pandangan seperti itu tetap diperjuangkan

Natsir hingga pascakemerdekaan, terutama pada waktu ia menjabat sebagai perdana menteri RI, ketika itu ia mengusulkan agar Islam dapat diterima sebagai Dasar Negara. Dalam kaitan itu Natsir menjelaskan bahwa sebagai agama yang mengakar dalam kehidupan mayoritas bangsa Indonesia, maka Islam patut diperhitungkan untuk itu. Ahmad (1981:127). Natsir dalam menyampaikan gagasan itu tentunya dengan kepala dingin, karena ia sendiri bukan seorang ekstrimis yang gegabah.

Dengan uraian tersebut dapat dipahami pandangan hidup Natsir yang konsisten dengan agamanya. Namun demikian sebagai pemimpin yang arif membaca tanda-tanda zaman ia dapat beradaptasi dengan kenyataan perkembangan yang tidak selamanya menopang ide-ide tersebut di atas. Ia terpaksa diperhadapkan menerima gagasan Sukarno sebagai tokoh yang amat berpengaruh itu mewujudkan negara demokrasi yang netral agama, selanjutnya menerima pula perubahan teks pancasila yang dalam piagam Jakarta menekankan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan kalimat ketuhanan yang maha Esa. Bahkan terpaksa menerima pembubaran partai Masyumi yang dipimpinya karena dianggap tidak loyal terhadap kebijaksanaan pemimpin revolusi. Di masa hidupnya ia mengalami pula pencopotan asas Islam dalam organisasi sosial dan politik yang selama ini tetap mendapat legitimasi dari pemerintah termasuk dalam era orde lama.

Natsir mengakui semua itu merupakan pengorbanan ummat Islam demi keutuhan negara yang telah diperjuangkannya dengan tetesan darah dan air mata. Pada masa orde baru gagasan Natsir lebih ditekankan kepada perlunya iklim kebebasan mengeluarkan pendapat bagi ummat Islam khususnya yang selama ini selalu dipojokkan dan dikambinghitamkan.

Kepada ummat Islam, Natsir senantiasa menyerukan persatuan. Dalam bukunya *Mempersatukan Ummat*. Natsir mengemukakan iman sebagai dasar persatuan sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Hujurat ayat 10, ini dipesankan agar terus menerus ditabligkan kepada ummat. Persatuan adalah soal hati bukan sekedar pengetahuan tentang baik buruknya persatuan dan perpecahan, karena itu harus menjadi tujuan hidup yang diniatkan oleh hati untuk mencapainya, juga harus menjadi amal yang bersih dan ikhlas. Perbedaan pendapat dalam kejujuran adalah hal yang lumrah dalam kehidupan manusia, yang penting tidak ditunggangi hawa nafsu hendak menang sendiri. Natsir juga menekankan bahwa persatuan yang dipaksakan tidak akan berumur panjang. Karena itu ia tidak setuju dengan gagasan penyatuan organisasi Islam seperti PPP dan semacamnya, karena itu merupakan suatu paksaan. Juga bahwa timbulnya perpecahan ummat Islam tidak ditentukan banyaknya organisasi Islam, melainkan karena sikap ketidakterbukaan untuk salingmemberi dan menerima gagasan yang baik (Natsir, 1983:9).

Demikianlah sekilas tentang seorang tokoh dan pemikirannya dalam kajian pemikiran Islam kontemporer. Walaupun penulis menyadari bahwa makalah ini teramat singkat untuk menggambarkan pemikiran Natsir yang telah melewati masa kehidupan yang cukup panjang, namun sebagaisuatu upaya konstruktif kiranya patut dipertimbangkan sebagai bahan diskusi.

Kesimpulan

1. Jika dilihat dari segi zamannya pada masa kolonial dan awal pembentukan negara kita, Natsir dengan gagasan pendidikan dan politiknya dapat dimasukkan sebagai kelompok pembaharu. Kesadaran akan perlunya keterbukaan menerima kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam dalam bidang pendidikan merupakan suatu gagasan yang langka pada masanya. Demikian juga gagasan perlunya menjelaskan secara Islam tentang konsep kebangsaan, demokrasi dan persatuan adalah merupakan suatu perjuangan yang tetap menjadi cita-cita dan acuan bagi ummat Islam Indonesia. Gagasan itu secara utuh tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan tersudutkan

oleh pandangan lain yang lebih bersifat netral. Namun kegagalan itu dirasakan sebagai milik ummat Islam pada umumnya yang sadar akan arti agamanya. Setidak-tidaknya diakui oleh semua ummat Islam sebagai pengorbanan demi kelanggengan negara yang telah diperjuangkan oleh mayoritas bangsa Indonesia yang beragama Islam.

2. Bahwa segala bentuk pemikiran Natsir, khususnya dalam bidang pendidikan dan politik seperti yang telah diuraikan di atas, merupakan refleksi dari jiwa Islamnya yang tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Walaupun secara taktis ia harus beradaptasi dengan kenyataan yang diperhadapkan kepadanya. Dalam hal ini Natsir tidak melihat Barat dan Timur sebagai patokan. Baginya dapat saja menerima atau menolak perkembangan Barat maupun tradisi adat istiadat Timur, hal ini tergantung dari nilai positifnya, apakah itu dapat menunjang prinsip-prinsip Islam yang diyakini kebenarannya.
3. Suatu hal yang unik jika dibandingkan dengan para pembaharu pada umumnya di dunia internasional seperti Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh dan sebagainya, bahwa Natsir masih tergolong penganut aliran Ahl-Sunnah yang setia, sekalipun tidak menutup mata untuk mengakui peran yang dimainkan oleh aliran rasional Islam seperti Mu'tazilah. Ia tetap kukuh menganut prinsip tauhid, qada dan qadar ala tradisionalis, namun tidak menjadi penghalang dalam segala upaya pembaharuan.

Daftar Pustaka

- Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1990, h. 100.
- Ma'arif Ahmad Syafi'i, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1985
- Muhammad Natsir, Word of Islam Festival dalam Perspektif Sejarah, Jakarta: Yayasan Idayu, 1980
- Muhammad Natsir, Islam dan Akal Merdeka, Jakarta: MediaDa'wah, 1988
- Muhammad Natsir, Capita Selecta I. Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hove, 1954
- Muhammad Natsir, Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme dan Nostalgia, Jakarta: MediaDa'wah, 1987
- Muhammad Natsir, "Kebangsaan Muslim", Pembela Islam No. 36 (Oktober 1931)
- Muhammad Natsir, Mempersatukan Ummat. Jakarta: Samudera. 1983
- Puar, Yusuf Abdullah (Ed), Mohammad Natsir 70 tahun: Kenang-Kenangandan Perjuangan, Jakarta: Pustaka Antara, 1978, h. 29